



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

bangga
melayai
bangsa

EVALUASI RENCANA AKSI BAPPEDA 2022



EVALUASI RENCANA AKSI
BAPPEDA KABUPATEN BONE PERIODE 2013-2018
TRIWULAN I (PERTAMA) TAHUN ANGGARAN 2022

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN KINERJA SASARAN		PROGRAM	INDIKATOR	ANGGARAN (Rp.)	Realisasi Anggaran Program			KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	TARGET (TW I)	Realisasi Anggaran Kegiatan			FAKTOR		KESIMPULAN KEBERHASILAN/ KEGAGALAN	URAIAN REKOMENDASI	ALTERNATIF SOLUSI / TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
		STRATEGIS	SASARAN		REALISASI KINERJA	%		PROGRAM		Rp.	Keu (%)	Fisik (%)							Rp.	Keu (%)	Fisik (%)	PENDUKUNG	PENGHAMBAT				
1	Meningkatkan akuntabilitas kinerja urusan penunjang Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja urusan penunjang perencanaan Daerah	Predikat SAKIP oleh APIP	Predikat	A	100%																					
							Penunjang Urusan Pemerintahan Umum Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penenuhan kebutuhan pelayanan administrasi pekantoran (%)	5.433.687.160	922.503.458	16,98	16,98															
												Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	39.435.200	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan perangkat daerah yang tersusun (dokumen)	39.435.200	10 %	4.485.300	11,37	11,37	SDM yang mumpuni dan anggaran untuk kegiatan tersebut	Masih adanya ego sektoral antar bidang dalam penyelesaian pekerjaan	Berhasil	Menata secara terstruktur seluruh dokumen perencanaan	Meningkatkan kualitas SDM dalam menyusun dokumen perencanaan	Sekretariat	
													Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD Perangkat Daerah yang tersusun	10.454.650	10 %	3.560.280	34,05	34,05	Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai serta didukung dengan aplikasi SIPD	Lambatnya pengusulan komponen/item belanja pada aplikasi SIPD	Berhasil	Mengidentifikasi seluruh kebutuhan belanja barang dan jasa	Rapat Koordinasi secara berkala dalam lingkup internal	Sekretariat		
													Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD Perangkat Daerah yang tersusun	5.535.000	10 %	3.535.000	63,87	63,87	Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai serta didukung dengan aplikasi SIPD	akses masuk pada aplikasi SIPD masih lambat	Berhasil	Mengidentifikasi seluruh kebutuhan belanja barang dan jasa	Rapat Koordinasi secara berkala dalam lingkup internal	Sekretariat		
													Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan khtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Evaluasi dan pelaporan capaian kinerja daerah yang tersusun (dokumen)	7.438.640	80%	2.652.180	35,65	35,65	Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan seluruh pegawai Bappeda sehingga tercipta suasana kerja yang nyaman	Kurangnya pemahaman ASN terhadap tupoksi masing-masing	Berhasil	Menata secara terstruktur seluruh dokumen evaluasi perencanaan	Membentuk tim monitoring dan evaluasi kinerja	Sekretariat		
												Administrasi Keuangan Perangkat daerah	3.659.336.270	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah laporan realisasi pembayaran gaji dan tunjangan beserta tambahan penghasilan bulanan bagi ASN (laporan)	3.603.721.520	25%	522.005.900	14,49	14,49	Rencana pembayaran/ target pembayaran gaji sudah disusun secara baik dan akurat	-	Berhasil	Pembayaran gaji ASN Bappeda terbayar tepat waktu	Tetap mempertahankan sistem yang telah ada	Sekretariat	
													Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD	Jumlah Dokumen Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang tersusun dan dilaporkan sesuai kewajiban Perangkat Daerah (dokumen)	55.614.750	50%	6.343.400	11,41	11,41	Optimalisasi peran SDM dalam penyusunan laporan keuangan (Pimpinan, PPTK, Bendahara, Operator)	laporan pertanggungjawaban masing-masing PPTK terkadang lambat	Berhasil	Merealisasikan gaji dan memberikan reward bagi ASN yang berprestasi	Tetap mempertahankan sistem yang telah ada	Sekretariat		
												Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	104.568.750	Pengadaan Pakain Dinas Beserta atribut kelengkapannya	Jumlah paket pengadaan pakaian dinas bagi pegawai perangkat daerah sesuai rencana kebutuhan (paket)	15.000.000	100 %	15.000.000	100	100	Adanya cukup anggaran yang diberikan	-	Berhasil	Perencanaan dan pengadaan yang baik dan mempertimbangkan efisiensi anggaran	Tetap mempertahankan sistem yang telah ada	Sekretariat	
													Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat PIM (orang)	20.230.000	50%	-	-	-	Adanya cukup anggaran yang diberikan	adanya perubahan jadwal oleh pihak panitia	Berhasil	Perencanaan dan penganggaran yang matang adalah jalan terbaik	Jadwal harus disusun dengan baik	Sekretariat		
													Bimbingan Teknis implementasi Peraturan Perundang Undangan	Jumlah laporan kegiatan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan yang terlaksana (laporan)	69.338.750	25 %	-	-	-	adanya dukungan penuh dari pimpinan untuk meningkatkan kapasitas SDM Bappeda	-	Berhasil	Pemberian Bimbingan Teknis dalam lingkup SKPD salah satu opsi mengefisiensi anggaran	Tetap mempertahankan sistem yang telah ada	Sekretariat		
												Administrasi Umum Perangkat Daerah	644.600.770	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan penunjang administrasi perkantoran sesuai rencana kebutuhan perbulan (paket)	60.239.750	25%	8.919.350	14,81	14,81	Dukungan ketersediaan anggaran dalam pengadaan barang/jasa dan pemeliharaan	adanya item belanja yang tidak terdapat dalam e-catalog	Berhasil	Menerapkan budaya penghematan atau penyediaan bahan logistik sesuai kebutuhan	Penyesuaian jenis belanja yang tidak terdapat dalam e-catalog	Sekretariat	
													Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket penyediaan peralatan dan perlengkapan rumah tangga perkantoran sesuai rencana kebutuhan (paket)	1.754.680	25%	846.180	48,22	48,22	Dukungan ketersediaan anggaran dalam pengadaan barang/jasa dan pemeliharaan	adanya item belanja yang tidak terdapat dalam e-catalog	Berhasil	Menerapkan budaya penghematan atau penyediaan bahan logistik sesuai kebutuhan	Penyesuaian jenis belanja yang tidak terdapat dalam e-catalog	Sekretariat		
													Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket penyediaan bahan logistik makanan dan minuman bagi pegawai sesuai rencana kebutuhan perbulan (paket)	39.883.520	38 %	15.983.452	40,08	40,08	Dukungan ketersediaan anggaran dalam pengadaan barang/jasa dan pemeliharaan	Item belanja tidak terdapat dalam e-catalog	Berhasil	Mengefektifkan dan mengefisienkan penyediaan ATK (digunakan seperlunya)	Penyesuaian jenis belanja yang prioritas	Sekretariat		
													Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan penunjang administrasi perkantoran sesuai rencana kebutuhan per bulan (paket)	14.082.500	30%	5.509.500	39,12	39,12	Adanya cukup anggaran yang diberikan dan kegiatan dimaksud di dalamnya sifatnya wajib	Item belanja tidak terdapat dalam e-catalog	Berhasil	Mengupayakan pencetakan dan penggandaan secara mandiri	Tetap mempertahankan sistem yang telah ada	Sekretariat		
													Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Pembayaran Paket Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan sesuai rencana kebutuhan per bulan (eksamplar)	20.580.000	25 %	14.660.000	71,23	71,23	Adanya cukup anggaran yang diberikan dan kegiatan dimaksud di dalamnya sifatnya wajib	Regulasi yang cepat berubah	Berhasil	Sebaiknya bahan bacaan yang di anggarkan sesuai dengan bacaan-berita yang teraktual terkait Perda terkait ketentrman dan ketertiban umum	Tetap mempertahankan sistem yang telah ada	Sekretariat		

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN KINERJA SASARAN		PROGRAM	INDIKATOR	ANGGARAN (Rp.)	Realisasi Anggaran Program			KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	TARGET (TW I)	Realisasi Anggaran Kegiatan			FAKTOR		KESIMPULAN KEBERHASILAN/ KEGAGALAN	URAIAN REKOMENDASI	ALTERNATIF SOLUSI / TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
		STRATEGIS	SASARAN		REALISASI KINERJA	%		PROGRAM		Rp.	Keu (%)	Fisik (%)							Rp.	Keu (%)	Fisik (%)	PENDUKUNG	PENGHAMBAT				
															Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Musrenbang RKPD yang dilaksanakan	51.364.940	100 %	39.004.940	75,94	75,94	Adanya anggaran serta SDM yang mumpuni untuk menjalankan kegiatan yang sifatnya wajib	Terbatasnya kemampuan APBD mempengaruhi realisasi usulan prgram kegiatan melalui musrenbang	Berhasil	Meningkatkan lagi kegiatan ini secara rutin dan berkesinambungan dalam menampung segala usulan masyarakat maupun OPD	Updating seora berkala jadwal perencanaan yang dikondisikan dengan dinamika proses perencanaan yang berlangsung	Bidang PPD
															Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Laporan Bahan Musrenbang yang tersedia untuk Kecamatan	20.574.000	100%	15.574.000	75,70	75,70	Adanya anggaran serta SDM yang mumpuni untuk menjalankan kegiatan yang sifatnya wajib	Terbatasnya kemampuan APBD mempengaruhi realisasi usulan prgram kegiatan melalui musrenbang	Berhasil	Meningkatkan lagi kegiatan ini secara rutin dan berkesinambungan dalam menampung segala usulan masyarakat	Updating seora berkala jadwal perencanaan yang dikondisikan dengan dinamika proses perencanaan yang berlangsung	Bidang PPD
															Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	1. Jumlah Dokumen RKPD yang ditetapkan 2. Jumlah dokumen RPJMD yang tersusun	278.168.770	50%	40.625.490	14,60	14,60	Komitemen seluruh aparat Perencana Kabupaten Bone untuk penyelesaian dokumen perencanaan	Proses perencanaan melalui aplikasi SIPD yang seringkali terkendala oleh proses penuntakhirkan secara sepihak oleh Kemendagri	Berhasil	Menata secara terstruktur seluruh dokumen perencanaan	Updating seora berkala jadwal perencanaan yang dikondisikan dengan dinamika proses perencanaan yang berlangsung	Bidang PPD
															Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan OPD	70.142.000	20%	10.098.000	14,40	14,40	Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi	Keterlambatan dan keakuratan data dari OPD	Berhasil	memanfaatkan aplikasi e-Planning dalam proses perencanaan	Memfasilitasi perbaikan database perencanaan pembangunan daerah	Bidang PPD
3		Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase terget tahunan prioritas pembangunan daerah yang tercapai	Persen	100%	TW 1 : 45,84 TW 2 : 71,72 TW 3 : 90,88 TW 4 : 100							Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	145.843.860	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi pembangunan daerah yang tersusun	145.843.860	25%	63.600.000	43,61	43,61	Tersedianya Peraturan Perundang-Undangan yaitu Undang-Undang No.25 Tahun 2004, Permendagri No.86 Tahun 2017 dan PP No.8 Tahun 2008	Kualitas SDM Perangkat daerah masih lemah	Berhasil	Menata secara terstruktur seluruh dokumen dan laporan Movev secara berkala dan terstruktur	Peningkatan kapasitas SDM	Bidang PPD
													Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	145.843.860	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi pembangunan daerah yang tersusun	145.843.860	25%	63.600.000	43,61	43,61	Tersedianya Peraturan Perundang-Undangan yaitu Undang-Undang No.25 Tahun 2004, Permendagri No.86 Tahun 2017 dan PP No.8 Tahun 2008	Kualitas SDM Perangkat daerah masih lemah	Berhasil	Menata secara terstruktur seluruh dokumen dan laporan Movev secara berkala dan terstruktur	Peningkatan kapasitas SDM	Bidang PPD
4	Meningkatkan Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah	Meningkatnya Ketersediaan Dokumen Perencanaan Sektor dalam Menunjang Perumusan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase pemanfaatan dokumen perencanaan sektoral dalam pengambilan kebijakan perencanaan pembangunan	Persen	100%	TW 1 : 45,84 TW 2 : 71,72 TW 3 : 90,88 TW 4 : 100																					
							Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	1.363.910.500	274.848.199	0,20	0,20															
													Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	247.315.860	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan bidang pemerintahan yang tersusun	164.400.000	25%	78.255.050	47,60	47,60	Fasilitasi dan koordinasi yang baik dengan bidang terkait	Masih ada beberapa data yang belum akurat	Berhasil	Menata secara terstruktur seluruh dokumen perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Updating Data	Bidang PPM
													Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Jumlah dokumen hasil koordinasi perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia yang tersusun	141.000.000	25%	20.113.500	14,26	14,26	Fasilitasi dan koordinasi yang baik dengan bidang terkait	Masih ada beberapa data yang belum akurat	Berhasil	Menata secara terstruktur seluruh dokumen perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan manusia	Updating Data	Bidang PPM
													Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Pembangunan Manusia	75.000.000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang tersusun	75.000.000	25%	15.840.000	21,12	21,12	Fasilitasi dan koordinasi yang baik dengan bidang terkait	Masih ada beberapa data yang belum akurat		Menata secara terstruktur seluruh dokumen evaluasi perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan manusia	Updating Data	Bidang PPM

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN KINERJA SASARAN		PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	Realisasi Anggaran Program			KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	TARGET (TW I)	Realisasi Anggaran Kegiatan			FAKTOR		KESIMPULAN KEBERHASILAN/ KEGAGALAN	URAIAN REKOMENDASI	ALTERNATIF SOLUSI / TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
		STRATEGIS	SASARAN		REALISASI KINERJA	%				Rp.	Keu (%)	Fisik (%)							Rp.	Keu (%)	Fisik (%)	PENDUKUNG	PENGHAMBAT				
							Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam				Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA)	302.915.890	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD,RPJMD,dan RKPD)	Jumlah dokumen hasil koordinasi perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian yang tersusun	82.915.860	25%	19.331.210	23,31	23,31	Sistem dan Regulasi sudah ada	Ada beberapa perangkat daerah yang lambat dalam menyampaikan data	Berhasil	Menata secara terstruktur seluruh dokumen perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Koordinasi intensif baik langsung maupun tidak langsung	Bidang Perekonomian dan SDA	
												Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	220.000.030	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Bidang Perekonomian dan SDA yang tersusun	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Bidang Perekonomian dan SDA yang tersusun	220.000.030	25%	95.909.690	43,60	43,60	Sistem dan Regulasi sudah ada	Ada beberapa perangkat daerah yang lambat dalam menyampaikan data	Berhasil	Menata secara terstruktur seluruh dokumen dan laporan Movev secara berkala dan terstruktur	Menjalin komunikasi secara rutin	Bidang Perekonomian dan SDA	
												Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD,RPJMD,dan RKPD)	74.434.990	Jumlah dokumen hasil koordinasi perencanaan pembangunan daerah bidang SDA yang tersusun	Jumlah dokumen hasil koordinasi perencanaan pembangunan daerah bidang SDA yang tersusun	74.434.990	25%	16.395.909	22,03	22,03	Sistem dan Regulasi sudah ada	Ada beberapa perangkat daerah yang lambat dalam menyampaikan data	Berhasil	Menata secara terstruktur seluruh dokumen dan laporan Movev secara berkala dan terstruktur	Menjalin komunikasi secara rutin	Bidang Perekonomian dan SDA	
							Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan				Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	471.075.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Jumlah dokumen hasil koordinasi perencanaan pembangunan daerah bidang Infrastruktur yang tersusun	137.500.000	25%	9.805.000	7,13	7,13	Fasilitasi dan koordinasi kegiatan yang berkaitan dengan instruktur	Belum sinkronnya data infrastruktur dan kewilayahan	Berhasil	Menata secara terstruktur seluruh dokumen perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Sinkronisasi, koordinasi dalam penyusunan dan up date data infrastruktur dan kewilayahan	Bidang Infraswil	
												Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	183.575.000	Jumlah dokumen hasil koordinasi perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan yang tersusun	Jumlah dokumen hasil koordinasi perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan yang tersusun	183.575.000	25%	93.023.500	50,67	50,67	Terbentuknys team work pokja PKP dan Forum PKP	Up date data masih terkendala di OPD terkait Infrastruktur dan Kewilayahan	Berhasil	Menata secara terstruktur seluruh dokumen perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Sinkronisasi, koordinasi dan up dating data	Bidang Infraswil	
												Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	150.000.000	Jumlah dokumen hasil sinergitas dan harmonisasi dokumen perencanaan perangkat daerah bidang kewilayahan yang tersusun	Jumlah dokumen hasil sinergitas dan harmonisasi dokumen perencanaan perangkat daerah bidang kewilayahan yang tersusun	150.000.000	25%	53.679.100	35,79	35,79	Regulasi pembentukan Tim Penyusun Dokumen PSETK	Lambatnya OPD terkait dalam menindaklanjuti permintaan data	Berhasil	Menata secara terstruktur seluruh dokumen hasil sinergitas dan harmonisasi perencanaan Pembangunan Daerah	Sinkronisasi, koordinasi dan up dating data	Bidang Infraswil	

KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN BONE



[Handwritten signature]

Dr.H.ADE FARIQ ASHAR, S.STP,M.Si
Pangkat : Pembina Tk.I/IV.b
NIP : 19850126 200312 1 002

EVALUASI RENCANA AKSI BAPPEDA KABUPATEN BONE PERIODE 2013-2018 TRIWULAN II (KEDUA) TAHUN ANGGARAN 2022																											
NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	CAPAIAN KINERJA SASARAN		PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	Realisasi Anggaran Program			KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	TARGET	Realisasi Anggaran Kegiatan			FAKTOR		KESIMPULAN KEBERHASILAN / KEGAGALAN	URAIAN REKOMENDASI	ALTERNATIF SOLUSI / TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
					REALISASI KINERJA	%				Rp.	Keu (%)	Fisik (%)							Rp.	Keu (%)	Fisik (%)	PENDUKUNG	PENGHAMBAT				
1	Meningkatkan akuntabilitas kinerja urusan penunjang Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja urusan penunjang perencanaan Daerah	Predikat SAKIP oleh APIP	Predikat	A	100%																					
							Penunjang Urusan Pemerintahan Umum Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi pekantoran (%)	5.433.687.160	2.357.000.475	43,38	43,38															
													Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	39.435.200	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan perangkat daerah yang tersusun (dokumen)	39.435.200	70 %	4.560.200	11,56	11,56	SDM yang mumpuni dan anggaran untuk kegiatan tersebut	Masih adanya ego sektoral antar bidang dalam penyelesaian pekerjaan	Berhasil	Menata secara terstruktur seluruh dokumen perencanaan	Meningkatkan kualitas SDM dalam menyusun dokumen perencanaan	Sekretariat
															Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD Daerah yang tersusun	10.454.650	20 %	5.486.680	52,48	52,48	Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai serta didukung dengan aplikasi SIPD	Lambatnya pengusulan komponen/item belanja pada aplikasi SIPD	Berhasil	Mengidentifikasi seluruh kebutuhan belanja barang dan jasa	Rapat Koordinasi secara berkala dalam lingkup internal	Sekretariat
															Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD Daerah yang tersusun	5.535.000	20 %	3.535.000	63,87	63,87	Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai serta didukung dengan aplikasi SIPD	akses masuk pada aplikasi SIPD masih lambat	Berhasil	Mengidentifikasi seluruh kebutuhan belanja barang dan jasa	Rapat Koordinasi secara berkala dalam lingkup internal	Sekretariat
															Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan khtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Evaluasi dan pelaporan capaian kinerja daerah yang tersusun (dokumen)	7.438.640	10%	4.123.180	55,43	55,43	Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan seluruh pegawai Bappeda sehingga tercipta suasana kerja yang nyaman	Kurangnya pemahaman ASN terhadap tupoksi masing-masing	Berhasil	Menata secara terstruktur seluruh dokumen evaluasi perencanaan	Membentuk tim monitoring dan evaluasi kinerja	Sekretariat
													Adminstrasi Keuangan Perangkat daerah	3.659.336.270	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah laporan realisasi pembayaran gaji dan tunjangan beserta tambahan penghasilan bulanan bagi ASN (laporan)	3.603.721.520	25%	1.643.825.241	45,61	45,61	Rencana pembayaran/ target pembayaran gaji sudah disusun secara baik dan akurat	-	Berhasil	Pembayaran gaji ASN Bappeda terbayar tepat waktu	Tetap mempertahankan sistem yang telah ada	Sekretariat
															Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD	Jumlah Dokumen Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang tersusun dan dilaporkan sesuai kewajiban Perangkat Daerah (dokumen)	55.614.750	10%	29.036.900	52,21	52,21	Optimalisasi peran SDM dalam penyusunan laporan keuangan (Pimpinan, PPTK,Bendahara, Opeartor)	laporan pertanggungjawaban masing-masing PPTK terkadang lambat	Berhasil	Mercalisasikan gaji dan memberikan reward bagi ASN yang berprestasi	Tetap mempertahankan sistem yang telah ada	Sekretariat
													Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	104.568.750	Pengadaan Pakain Dinas Beserta atribut kelengkapannya	Jumlah paket pengadaan pakaian dinas bagi pegawai perangkat daerah sesuai rencana kebutuhan (paket)	15.000.000	100 %	15.000.000	100	100	Adanya cukup anggaran yang diberikan	-	Berhasil	Perencanaan dan pengadaan yang baik dan mempertimbangkan efisiensi anggaran	Tetap mempertahankan sistem yang telah ada	Sekretariat
															Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat PIM (orang)	20.230.000	100%	17.000.000	84,03	84,03	Adanya cukup anggaran yang diberikan	adanya perubahan jadwal oleh pihak panitia	Berhasil	Perencanaan dan penganggaran yang matang adalah jalan terbaik	Jadwal harus disusun dengan baik	Sekretariat
															Bimbingan Tehnis implementasi Peraturan Perundang Undangan	Jumlah laporan kegiatan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan yang terlaksana (laporan)	69.338.750	TW 2 :-	50.672.000	73,08	73,08	adanya dukungan penuh dari pimpinan untuk meningkatkan kapasitas SDM Bappeda	-	Berhasil	Pemberian Bimbingan Teknis dalam lingkup SKPD salah satu opsi mengefisiensi anggaran	Tetap mempertahankan sistem yang telah ada	Sekretariat
													Administrasi Umum Perangkat Daerah	644.600.770	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan penunjang administrasi perkantoran sesuai rencana kebutuhan perbulan (paket)	60.239.750	25%	20.835.750	34,59	34,59	Dukungan ketersediaan anggaran dalam pengadaan barang/jasa dan pemeliharaan	adanya item belanja yang tidak terdapat dalam e-catalog	Berhasil	Menerapkan budaya penghematan atau penyediaan bahan logistik sesuai kebutuhan	Penyesuaian jenis belanja yang tidak terdapat dalam e-catalog	Sekretariat
															Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket penyediaan bahan logistik makanan dan minuman bagi pegawai sesuai rencana kebutuhan perbulan (paket)	39.883.520	25%	7.762.688	19,46	19,46	Dukungan ketersediaan anggaran dalam pengadaan barang/jasa dan pemeliharaan	Item belanja tidak terdapat dalam e-catalog	Berhasil	Mengefektifkan dan mengefisienkan penyediaan ATK (digunakan seperlunya)	Penyesuaian jenis belanja yang prioritas	Sekretariat
															Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan penunjang administrasi perkantoran sesuai rencana kebutuhan per bulan (paket)	14.082.500	25%	3.918.100	27,82	27,82	Adanya cukup anggaran yang diberikan dan kegiatan dimaksud di dalamnya sifatnya wajib	Item belanja tidak terdapat dalam e-catalog	Berhasil	Mengupayakan pencetakan dan penggandaan secara mandiri	Tetap mempertahankan sistem yang telah ada	Sekretariat
															Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Pembayaran Paket Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan sesuai rencana kebutuhan per bulan (eksamplar)	20.580.000	25 %	5.500.000	26,72	26,72	Adanya cukup anggaran yang diberikan dan kegiatan dimaksud di dalamnya sifatnya wajib	Regulasi yang cepat berubah	Berhasil	Sebaiknya bahan bacaan yang di anggarkan sesuai dengan bacaan/berita yang terakutal terkait Perda terkait ketrnraman dan keteriban umum	Tetap mempertahankan sistem yang telah ada	Sekretariat
															Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang dihadiri/dilaksanakan oleh Aparat Perangkat Daerah (Laporan)	500.815.000	25%	130.287.800	26,02	26,02	Adanya cukup anggaran yang diberikan dan kegiatan dimaksud di dalamnya sifatnya wajib	Perjalanan dinas mempunyai kompleksitas yang berbeda tiap instansi	Berhasil	Perjalanan dinas hendaknya memperhatikan prinsip-prinsip yaitu selektif, ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja, efisien dan akuntabilitas	Tetap berpedoman pada regulasi yang ada	Sekretariat

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN KINERJA SASARAN		PROGRAM	INDIKATOR	ANGGARAN (Rp.)	Realisasi Anggaran Program			KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	TARGET	Realisasi Anggaran Kegiatan			FAKTOR		KESIMPULAN KEBERHASILAN / KEGAGALAN	URAIAN REKOMENDASI	ALTERNATIF SOLUSI / TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB		
		STRATEGIS	SASARAN		REALISASI KINERJA	%		PROGRAM		Rp.	Keu (%)	Fisik (%)							Rp.	Keu (%)	Fisik (%)	PENDUKUNG	PENGHAMBAT						
															Dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Paket Pemeliharaan Website penunjang administrasi perkantoran sesuai rencana kebutuhan (web)	9.000.000	25%	2.250.000	25,00	25,00	Adanya cukup anggaran yang diberikan dan kegiatan dimaksud di dalamnya sifatnya wajib	Website kadang lambat untuk diakses, kadang eror dan tampilan berubah	Berhasil	Penggunaan dan pemanfaatan SPBE sebaik mungkin	Harus dilakukan pengecekan secara berkala	Sekretariat		
														Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintahan Daerah	122.575.750	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Meubeleur Kantor sesuai rencana kebutuhan (unit)	6.050.000	-	-	-	Dokungan ketersediaan anggaran dalam pengadaan barang/jasa dan pemeliharaan	Spek tidak sesuai dengan yang tersedia ditoko	Berhasil	Pengadaan disesuaikan dengan kebutuhan dan mempertimbangkan tingkat kualitas peralatan dan mesin lainnya yang ada saat ini	Tetap mempertahankan sistem yang telah ada	Sekretariat		
															Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional sesuai rencana kebutuhan (unit)	270.000.000	100%	262.100.000	97,07	97,07								
															Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor sesuai rencana kebutuhan (paket)	116.525.750	50%	53.790.000	46,16	46,16	Dokungan ketersediaan anggaran dalam pengadaan barang/jasa dan pemeliharaan	-	Berhasil	Pengadaan disesuaikan dengan kebutuhan dan mempertimbangkan tingkat kualitas peralatan yang ada saat ini	Tetap mempertahankan sistem yang telah ada	Sekretariat		
															Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	212.392.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Realisasi Pembayaran Jasa Komunikasi/informasi (internet) sesuai rencana kebutuhan per bulan (rekening)	16.000.000	50%	8.418.152	52,61	52,61	Adanya cukup anggaran yang diberikan dan kegiatan dimaksud di dalamnya sifatnya wajib	lambatnya pencairan dana mempengaruhi pembayaran jasa komunikasi/informasi (internet)	Berhasil	Menerapkan budaya penggunaan kebutuhan seperlunya sesuai kebutuhan	Tetap mempertahankan sistem yang telah ada	Sekretariat
																Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Realisasi Pembayaran Jasa Tenaga Pelayanan Umum yang menunjang pelaksanaan administrasi perkantoran	196.392.000	50%	95.341.141	48,55	48,55	Adanya kewajiban membayarkan upah tenaga administrasi dan Kebersihan sehingga menjadi keharusan menyiapkan dan merealisasikan anggarannya	lambatnya pencairan dana mempengaruhi pembayaran jasa upah tenaga administrasi dan petugas kebersihan	Berhasil	Membatasi penerimaan tenaga non ASN	Tetap mempertahankan sistem yang telah ada	Sekretariat	
															Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	116.978.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan secara rutin/berkala sesuai rencana kebutuhan	103.508.000	50%	62.052.703	59,95	59,95	Adanya cukup anggaran yang diberikan dan kegiatan dimaksud di dalamnya sifatnya wajib	lambatnya pencairan dana mempengaruhi pembayaran pemeliharaan kendaraan	Berhasil	Meningkatkan budaya memelihara sarana dan prasarana kantor seperti memelihara sarana dan prasarana di rumah sendiri	Tetap mempertahankan sistem yang telah ada	Sekretariat
																Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara secara rutin/berkala sesuai rencana kebutuhan	8.150.000	50%	4.359.000	53,48	53,48	Adanya cukup anggaran yang diberikan dan kegiatan dimaksud di dalamnya sifatnya wajib	Belum ada rekanan yang ditunjuk oleh pihak pemerintah daerah yang mampu menyelesaikan semua masalah pemeliharaan peralatan dan mesin	Berhasil	Memelihara peralatan dan mesin lainnya di kantor seperti halnya kepemilikan pribadi	Tetap mempertahankan sistem yang telah ada	Sekretariat	
																Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan banguna lainnya	Jumlah Paket Pekerjaan Perbaikan/Pemeliharaan Gedung Kantor sesuai rencana kebutuhan (paket)	5.320.000	50%	3.000.000	56,39	56,39	Adanya cukup anggaran yang diberikan dan kegiatan dimaksud di dalamnya sifatnya wajib	Dengan adanya rehabilitasi gedung mempengaruhi kondisi kerja pegawai	Berhasil	Meningkatkan budaya memelihara sarana dan prasarana kantor seperti memelihara sarana dan prasarana di rumah sendiri	Tetap mempertahankan sistem yang telah ada	Sekretariat	
2	Meningkatkan Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah	Proporsi kegiatan masyarakat dalam musrenbang terhadap total APBD	Persen	100%	TW 1 : 45,84 TW 2 : 71,72 TW 3 : 90,88 TW 4 : 100																							
							Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	896.810.030	144.014.200	16,06	16,06																	
															Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	371.823.910	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah laporan forum konsultasi publik yang terlaksana	23.513.140	-	23.513.140	100	100	Komitemen seluruh aparat Perencana Kabupaten Bone untuk penyelesaian dokumen perencanaan	Proses perencanaan melalui aplikasi SIPD yang seringkali terkendala oleh proses pemutakhiran secara sepihak oleh Kemendagri	Berhasil	Meperbaiki relasi dengan SKPD lain yang terlibat dalam konsultasi publik	Updating seora berkala jadwal perencanaan yang dikondisikan dengan dinamika proses perencanaan yang berlangsung	Bidang PPD
															Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	371.823.910	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah laporan forum konsultasi publik yang terlaksana	23.513.140	-	23.513.140	100	100	Komitemen seluruh aparat Perencana Kabupaten Bone untuk penyelesaian dokumen perencanaan	Proses perencanaan melalui aplikasi SIPD yang seringkali terkendala oleh proses pemutakhiran secara sepihak oleh Kemendagri	Berhasil	Meperbaiki relasi dengan SKPD lain yang terlibat dalam konsultasi publik	Updating seora berkala jadwal perencanaan yang dikondisikan dengan dinamika proses perencanaan yang berlangsung	Bidang PPD
																Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Rekomendasi Forum SKPD yang terlaksana (rekomendasi)	9.590.000	100%	3.950.000	41,19	41,19	Komitemen seluruh aparat Perencana Kabupaten Bone untuk penyelesaian dokumen perencanaan	-	Berhasil	Meningkatkan lagi kegiatan ini secara rutin dan berkesinambungan dalam menampung segala usulan masyarakat maupun OPD	Updating seora berkala jadwal perencanaan yang dikondisikan dengan dinamika proses perencanaan yang berlangsung	Bidang PPD	
																Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Musrenbang RKPd yang dilaksanakan	51.364.940	-	39.004.940	75,94	75,94	Adanya anggaran serta SDM yang mumpuni untuk menjalankan kegiatan yang sifatnya wajib	Terbatasnya kemampuan APBD mempengaruhi realisasi usulan prgram kegiatan melalui musrenbang	Berhasil	Meningkatkan lagi kegiatan ini secara rutin dan berkesinambungan dalam menampung segala usulan masyarakat maupun OPD	Updating seora berkala jadwal perencanaan yang dikondisikan dengan dinamika proses perencanaan yang berlangsung	Bidang PPD	

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN KINERJA SASARAN		PROGRAM	INDIKATOR	ANGGARAN (Rp.)	Realisasi Anggaran Program			KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	TARGET	Realisasi Anggaran Kegiatan			FAKTOR		KESIMPULAN KEBERHASILAN / KEGAGALAN	URAIAN REKOMENDASI	ALTERNATIF SOLUSI / TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
		STRATEGIS	SASARAN		PROGRAM	Rp.		Keu (%)		Fisik (%)	PENDUKUNG	PENGHAMBAT															
		REALISASI KINERJA	%		PROGRAM	Rp.		Keu (%)		Fisik (%)	PENDUKUNG	PENGHAMBAT															
															Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Laporan Bahan Musrenbang yang tersedia untuk Kecamatan	20.574.000	-	15.574.000	75,70	75,70	Adanya anggaran serta SDM yang mumpuni untuk menjalankan kegiatan yang sifatnya wajib	Terbatasnya kemampuan APBD mempengaruhi realiasi usulan prgram kegiatan melalui musrenbang	Berhasil	Meningkatkan lagi kegiatan ini secara rutin dan berkesinambungan dalam menampung segala usulan masyarakat	Updating seora berkala jadwal perencanaan yang dikondisikan dengan dinamika proses perencanaan yang berlangsung	Bidang PPD
														Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	1. Jumlah Dokumen RKPD yang ditetapkan 2. Jumlah dokumen RPJMD yang tersusun	278.168.770	50%	108.244.200	38,91	38,91	Komitemen seluruh aparat Perencana Kabupaten Bone untuk penyelesaian dokumen perencanaan	Proses perencanaan melalui aplikasi SIPD yang seringkali terkendala oleh proses pemutakhiran secara sepihak oleh Kemendagri	Berhasil	Menata secara terstruktur seluruh dokumen perencanaan	Updating seora berkala jadwal perencanaan yang dikondisikan dengan dinamika proses perencanaan yang berlangsung	Bidang PPD	
													Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan	70.142.000	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan OPD	Jumlah Aplikasi e-planning yang dimanfaatkan	70.142.000	50%	20.196.000	28,79	28,79	Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi	Keterlambatan dan keakuratan data dari OPD	Berhasil	memanfaatkan aplikasi e-Planning dalam proses perencanaan	Memfasilitasi perbaikan database perencanaan pembangunan daerah	Bidang PPD
3		Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase terget tahunan prioritas pembangunan daerah yang tercapai	Persen	100%	TW 1 : 45,84 TW 2 : 71,72 TW 3 : 90,88 TW 4 : 100																					
													Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	145.843.860	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi pembangunan daerah yang tersusun	145.843.860	50%	83.243.830	57,08	57,08	Tersedianya Peraturan Perundang-Undangan yaitu Undang-Undang No.25 Tahun 2004, Permendagri No.86 Tahun 2017 dan PP No.8 Tahun 2008	Kualitas SDM Perangkat daerah masih lemah	Berhasil	Menata secara terstruktur seluruh dokumen dan laporan Monev secara berkala dan terstruktur	Peningkatan kapasitas SDM	Bidang PPD
4	Meningkatkan Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah	Meningkatnya Ketersediaan Dokumen Perencanaan Sektorral dalam Menunjang Perumusan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase pemanfaatan dokumen perencanaan sektoral dalam pengambilan kebijakan perencanaan pembangunan	Persen	100%	TW 1 : 45,84 TW 2 : 71,72 TW 3 : 90,88 TW 4 : 100																					
							Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	1.363.910.500	449.498.921	32,96%	32,96%															
													Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan	247.315.860	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan bidang pemerintahan yang tersusun	164.400.000	70%	115.713.800	70,39	70,39	Fasilitasi dan koordinasi yang baik dengan bidang terkait	Masih ada beberapa data yang belum akurat	Berhasil	Menata secara terstruktur seluruh dokumen perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Updating Data	Bidang PPM
													Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	141.000.000	Jumlah dokumen hasil koordinasi perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia yang tersusun	75.000.000	50%	67.218.440	47,67	47,67	Fasilitasi dan koordinasi yang baik dengan bidang terkait	Masih ada beberapa data yang belum akurat	Berhasil	Menata secara terstruktur seluruh dokumen perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan manusia	Updating Data	Bidang PPM	
													Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Pembangunan Manusia	75.000.000	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang tersusun	75.000.000	40%	24.681.000	32,91	32,91	Fasilitasi dan koordinasi yang baik dengan bidang terkait	Masih ada beberapa data yang belum akurat	Berhasil	Menata secara terstruktur seluruh dokumen evaluasi perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan manusia	Updating Data	Bidang PPM	
													Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA)	302.915.890	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD,RPJMD,dan RKPD)	Jumlah dokumen hasil koordinasi perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian yang tersusun	82.915.860	30%	29.835.236	35,98	35,98	Sistem dan Regulasi sudah ada	Ada beberapa perangkat daerah yang lambat dalam menyampaikan data	Berhasil	Menata secara terstruktur seluruh dokumen perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Koordinasi intensif baik langsung maupun tidak langsung	Bidang Perekonomian dan SDA
													Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	220.000.030	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Bidang Perekonomian dan SDA yang tersusun	220.000.030	70%	147.925.012	67,24	67,24	Sistem dan Regulasi sudah ada	Ada beberapa perangkat daerah yang lambat dalam menyampaikan data	Berhasil	Menata secara terstruktur seluruh dokumen dan laporan Monev secara berkala dan terstruktur	Menjalin komunikasi secara rutin	Bidang Perekonomian dan SDA	
													Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD,RPJMD,dan RKPD)	74.434.990	Jumlah dokumen hasil koordinasi perencanaan pembangunan daerah bidang SDA yang tersusun	74.434.990	50%	31.456.509	42,26	42,26	Sistem dan Regulasi sudah ada	Ada beberapa perangkat daerah yang lambat dalam menyampaikan data	Berhasil	Menata secara terstruktur seluruh dokumen dan laporan Monev secara berkala dan terstruktur	Menjalin komunikasi secara rutin	Bidang Perekonomian dan SDA	

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	CAPAIAN KINERJA SASARAN		PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	Realisasi Anggaran Program			KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	TARGET	Realisasi Anggaran Kegiatan			FAKTOR		KESIMPULAN KEBERHASILAN / KEGAGALAN	URAIAN REKOMENDASI	ALTERNATIF SOLUSI / TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
					REALISASI KINERJA	%				Rp.	Keu (%)	Fisik (%)							Rp.	Keu (%)	Fisik (%)	PENDUKUNG	PENGHAMBAT				
													Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	471.075.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah dokumen hasil koordinasi perencanaan pembangunan daerah bidang Infrastruktur yang tersusun	137.500.000	50%	55.120.800	40,09	40,09	Fasilitasi dan koordinasi kegiatan yang berkaitan dengan instruktur	Belum sinkronnya data infrastruktur dan kewilayahan	Berhasil	Menata secara terstruktur seluruh dokumen perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Sinkronisasi, koordinasi dalam penyusunan dan up date data infrastruktur dan kewilayahan	Bidang Infraswil
													Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)		Koordinasi perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan yang tersusun	Jumlah dokumen hasil koordinasi perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan yang tersusun	183.575.000	50%	101.246.400	55,15	55,15	Terbentuknys team work pokja PKP dan Forum PKP	Up date data masih terkendala di OPD terkait Infrastruktur dan Kewilayahan	Berhasil	Menata secara terstruktur seluruh dokumen perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Sinkronisasi, koordinasi dan up dating data	Bidang Infraswil
													Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan yang tersusun	Jumlah dokumen hasil sinergitas dan harmonisasi dokumen perencanaan perangkat daerah bidang kewilayahan yang tersusun	150.000.000	80%	144.190.000	96,13	96,13	Regulasi pembentukan Tim Penyusun Dokumen PSETK	Lambatnya OPD terkait dalam menindaklanjuti permintaan data	Berhasil	Menata secara terstruktur seluruh dokumen hasil sinergitas dan harmonisasi perencanaan Pembangunan Daerah	Sinkronisasi, koordinasi dan up dating data	Bidang Infraswil

KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN BONE



D. H. ADE FARIQ ASHAR, S.STP,M.Si
Pangkat : Pembina Tk.I/IV.b
NIP : 19850126 200312 1 002

EVALUASI RENCANA AKSI
BAPPEDA KABUPATEN BONE PERIODE 2013-2018
TRIWULAN III (KETIGA) TAHUN ANGGARAN 2022

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN KINERJA SASARAN		PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	Realisasi Anggaran Program			KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	TARGET	Realisasi Anggaran Kegiatan			FAKTOR		KESIMPULAN KEBERHASILAN/ KEGAGALAN	URAIAN REKOMENDASI	ALTERNATIF SOLUSI / TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB			
		STRATEGIS	SASARAN		REALISASI KINERJA	%				Rp.	Keu (%)	Fisik (%)							Rp.	Keu (%)	Fisik (%)	PENDUKUNG	PENGHAMBAT							
1	Meningkatkan akuntabilitas kinerja urusan penunjang Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja urusan penunjang perencanaan Daerah	Predikat SAKIP oleh APIP	Predikat	A	100%																								
							Penunjang Urusan Pemerintahan Umum Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi pekantoran (%)	5.433.687.160	3.808.062.643	70,08	70,08																		
													Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	39.435.200	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan perangkat daerah yang tersusun (dokumen)	39.435.200	10 %	6.560.200	16,64	16,64	SDM yang mumpuni dan anggaran untuk kegiatan tersebut	Masih adanya ego sektoral antar bidang dalam penyelesaian pekerjaan	Berhasil	Menata secara terstruktur seluruh dokumen perencanaan	Meningkatkan kualitas SDM dalam menyusun dokumen perencanaan	Sekretariat			
															Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD Daerah yang tersusun	10.454.650	20 %	4.100.650	39,22	39,22	Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai serta didukung dengan aplikasi SIPD	Lambatnya pengusulan komponen/item belanja pada aplikasi SIPD	Berhasil	Mengidentifikasi seluruh kebutuhan belanja barang dan jasa	Rapat Koordinasi secara berkala dalam lingkup internal	Sekretariat			
															Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD Perangkat Daerah yang tersusun	5.535.000	20 %	5.135.000	92,77	92,77	Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai serta didukung dengan aplikasi SIPD	akses masuk pada aplikasi SIPD masih lambat	Berhasil	Mengidentifikasi seluruh kebutuhan belanja barang dan jasa	Rapat Koordinasi secara berkala dalam lingkup internal	Sekretariat			
															Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan khtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Evaluasi dan pelaporan capaian kinerja daerah yang tersusun (dokumen)	7.438.640	10%	6.262.640	84,19	84,19	Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan seluruh pegawai Bappeda sehingga tercipta suasana kerja yang nyaman	Kurangnya pemahaman ASN terhadap tupoksi masing-masing	Berhasil	Menata secara terstruktur seluruh dokumen evaluasi perencanaan	Membentuk tim monitoring dan evaluasi kinerja	Sekretariat			
																Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah laporan realisasi pembayaran gaji dan tunjangan beserta tambahan penghasilan bulanan bagi ASN (laporan)	3.603.721.520	25%	2.567.657.584	71,25	71,25	Rencana pembayaran/ target pembayaran gaji sudah disusun secara baik dan akurat	-	Berhasil	Pembayaran gaji ASN Bappeda terbayar tepat waktu	Tetap mempertahankan sistem yang telah ada	Sekretariat		
																Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD	Jumlah Dokumen Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang tersusun dan dilaporkan sesuai kewajiban Perangkat Daerah (dokumen)	55.614.750	10%	42.144.750	75,78	75,78	Optimalisasi peran SDM dalam penyusunan laporan keuangan (Pimpinan, PPTK,Bendahara, Opeartor)	laporan pertanggungjawaban masing-masing PPTK terkadang lambat	Berhasil	Merealisasikan gaji dan memberikan reward bagi ASN yang berprestasi	Tetap mempertahankan sistem yang telah ada	Sekretariat		
																	Pengadaan Pakain Dinas Beserta atribut kelengkapannya	Jumlah paket pengadaan pakaian dinas bagi pegawai perangkat daerah sesuai rencana kebutuhan (paket)	15.000.000	100 %	-	-	-	Adanya cukup anggaran yang diberikan	-	Berhasil	Perencanaan dan pengadaan yang baik dan mempertimbangkan efisiensi anggaran	Tetap mempertahankan sistem yang telah ada	Sekretariat	
																	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat PIM (orang)	20.230.000	100%	-	-	-	Adanya cukup anggaran yang diberikan	adanya perubahan jadwal oleh pihak panitia	Berhasil	Perencanaan dan penganggaran yang matang adalah jalan terbaik	Jadwal harus disusun dengan baik	Sekretariat	
																	Bimbingan Tehnis implementasi Peraturan Perundang Undangan	Jumlah laporan kegiatan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan yang terlaksana (laporan)	69.332.000	-	-	-	-	adanya dukungan penuh dari pimpinan untuk meningkatkan kapasitas SDM Bappeda	-	Berhasil	Pemberian Bimbingan Teknis dalam lingkup SKPD salah satu opsi mengefisiensi anggaran	Tetap mempertahankan sistem yang telah ada	Sekretariat	
																		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor penunjang administrasi perkantoran sesuai rencana kebutuhan perbulan (paket)	60.239.750	25%	33.167.250	55,06	55,06	Dukungan ketersediaan anggaran dalam pengadaan barang/jasa dan pemeliharaan	adanya item belanja yang tidak terdapat dalam e-catalog	Berhasil	Menerapkan budaya penghematan atau penyediaan bahan logistik sesuai kebutuhan	Penyesuaian jenis belanja yang tidak terdapat dalam e-catalog	Sekretariat
																		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket penyediaan bahan logistik makanan dan minuman bagi pegawai sesuai rencana kebutuhan perbulan (paket)	39.883.520	25%	30.422.450	76,28	76,28	Dukungan ketersediaan anggaran dalam pengadaan barang/jasa dan pemeliharaan	Item belanja tidak terdapat dalam e-catalog	Berhasil	Mengefektifkan dan mengefisienkan penyediaan ATK (digunakan seperlunya)	Penyesuaian jenis belanja yang prioritas	Sekretariat
																		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan penunjang administrasi perkantoran sesuai rencana kebutuhan per bulan (paket)	14.082.500	25%	9.845.750	69,91	69,91	Adanya cukup anggaran yang diberikan dan kegiatan dimaksud di dalamnya sifatnya wajib	Item belanja tidak terdapat dalam e-catalog	Berhasil	Mengupayakan pencetakan dan penggandaan secara mandiri	Tetap mempertahankan sistem yang telah ada	Sekretariat

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN KINERJA SASARAN		PROGRAM	INDIKATOR	ANGGARAN (Rp.)	Realisasi Anggaran Program			KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	TARGET	Realisasi Anggaran Kegiatan			FAKTOR		KESIMPULAN KEBERHASILAN/ KEGAGALAN	URAIAN REKOMENDASI	ALTERNATIF SOLUSI / TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
		STRATEGIS	SASARAN		REALISASI KINERJA	%		PROGRAM		Rp.	Keu (%)	Fisik (%)							Rp.	Keu (%)	Fisik (%)	PENDUKUNG	PENGHAMBAT				
													Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan	247.315.860	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan bidang pemerintahan yang tersusun	164.400.000	70%	145.881.000	88,74	88,74	Fasilitasi dan koordinasi yang baik dengan bidang terkait	Masih ada beberapa data yang belum akurat	Berhasil	Menata secara terstruktur seluruh dokumen perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Updating Data	Bidang PPM
														Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Jumlah dokumen hasil koordinasi perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia yang tersusun	141.000.000	70%	114.814.485	81,43	81,43	Fasilitasi dan koordinasi yang baik dengan bidang terkait	Masih ada beberapa data yang belum akurat	Berhasil	Menata secara terstruktur seluruh dokumen perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan manusia	Updating Data	Bidang PPM	
														Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang tersusun	75.000.000	70%	46.140.000	61,52	61,52	Fasilitasi dan koordinasi yang baik dengan bidang terkait	Masih ada beberapa data yang belum akurat		Menata secara terstruktur seluruh dokumen evaluasi perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan manusia	Updating Data	Bidang PPM	
													Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA)	302.915.890	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD,RPJMD,dan RKPD)	Jumlah dokumen hasil koordinasi perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian yang tersusun	82.915.860	60%	54.936.741	66,26	66,26	Sistem dan Regulasi sudah ada	Ada beberapa perangkat daerah yang lambat dalam menyampaikan data	Berhasil	Menata secara terstruktur seluruh dokumen perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Koordinasi intensif baik langsung maupun tidak langsung	Bidang Perekonomian dan SDA
														Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Bidang Perekonomian dan SDA yang tersusun	220.000.030	70%	166.445.512	75,66	75,66	Sistem dan Regulasi sudah ada	Ada beberapa perangkat daerah yang lambat dalam menyampaikan data	Berhasil	Menata secara terstruktur seluruh dokumen dan laporan Money secara berkala dan terstruktur	Menjalin komunikasi secara rutin	Bidang Perekonomian dan SDA	
														Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD,RPJMD,dan RKPD)	Jumlah dokumen hasil koordinasi perencanaan pembangunan daerah bidang SDA yang tersusun	74.434.990	75%	45.655.109	61,34	61,34	Sistem dan Regulasi sudah ada	Ada beberapa perangkat daerah yang lambat dalam menyampaikan data	Berhasil	Menata secara terstruktur seluruh dokumen dan laporan Money secara berkala dan terstruktur	Menjalin komunikasi secara rutin	Bidang Perekonomian dan SDA	
													Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	471.075.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Jumlah dokumen hasil koordinasi perencanaan pembangunan daerah bidang Infrastruktur yang tersusun	137.500.000	75%	103.829.700	75,51	75,51	Fasilitasi dan koordinasi kegiatan yang berkaitan dengan instruktur	Belum sinkronnya data infrastruktur dan kewilayahan	Berhasil	Menata secara terstruktur seluruh dokumen perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Sinkronisasi, koordinasi dalam penyusunan dan up date data infrastruktur dan kewilayahan	Bidang Infraswil
														Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Jumlah dokumen hasil koordinasi perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan yang tersusun	183.575.000	75%	82.613.000	45,00	45,00	Terbentuknys team work pokja PKP dan Forum PKP	Up date data masih terkendala di OPD terkait Infrastruktur dan Kewilayahan	Berhasil	Menata secara terstruktur seluruh dokumen perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Sinkronisasi, koordinasi dan up dating data	Bidang Infraswil	
														Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah dokumen hasil sinergitas dan harmonisasi dokumen perencanaan perangkat daerah bidang kewilayahan yang tersusun	150.000.000	80%	144.190.000	96,13	96,13	Regulasi pembentukan Tim Penyusun Dokumen PSETK	Lambatnya OPD terkait dalam menindaklanjuti permintaan data	Berhasil	Menata secara terstruktur seluruh dokumen hasil sinergitas dan harmonisasi perencanaan Pembangunan Daerah	Sinkronisasi, koordinasi dan up dating data	Bidang Infraswil	

KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN BONE



Dr. H.ADE FARIQ ASHAR, S.STP,M.Si
Pangkat : Pembina Tk.I/IV.b
NIP : 19850126 200312 1 002

EVALUASI RENCANA AKSI
BAPPEDA KABUPATEN BONE PERIODE 2013-2018
TRIWULAN IV (KEEMPAT) TAHUN ANGGARAN 2022

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN KINERJA SASARAN		PROGRAM	INDIKATOR	ANGGARAN (Rp.)	Realisasi Anggaran Program			KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	TARGET	Realisasi Anggaran Kegiatan			FAKTOR		KESIMPULAN KEBERHASILAN/ KEGAGALAN	URAIAN REKOMENDASI	ALTERNATIF SOLUSI / TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
		STRATEGIS	SASARAN		REALISASI KINERJA	%		PROGRAM		Rp.	Keu (%)	Fisik (%)							PENDUKUNG	PENGHAMBAT							
1	Meningkatkan akuntabilitas kinerja urusan penunjang Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja urusan penunjang perencanaan Daerah	Predikat SAKIP oleh APID	Predikat	A	100%																					
							Penunjang Urusan Pemerintahan Umum Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi pekantoran (%)	5.433.687.160	5.174.390.508	95,23	100															
													Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	39.435.200	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen perencanaan dan anggaran untuk kegiatan perangkat daerah yang tersusun (dokumen)	14.092.900	TW 4 : 10 %	7.032.700	49,90	49,90	SDM yang mumpuni dan anggaran untuk kegiatan tersebut	Masih adanya ego sektoral antar bidang dalam penyelesaian pekerjaan	Berhasil	Menata secara terstruktur seluruh dokumen perencanaan	Meningkatkan kualitas SDM dalam menyusun dokumen perencanaan	Sekretariat
															Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD Perangkat Daerah yang tersusun	15.209.300	TW 4 : 20 %	5.124.650	33,69	33,69	Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai serta didukung dengan aplikasi SIPD	Lambatnya pengusulan komponen/item belanja pada aplikasi SIPD	Berhasil	Mengidentifikasi seluruh kebutuhan belanja barang dan jasa	Rapat Koordinasi secara berkala dalam lingkup internal	Sekretariat
															Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD Perangkat Daerah yang tersusun	8.330.000	TW 4 : 20 %	3.195.000	38,36	38,36	Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai serta didukung dengan aplikasi SIPD	akses masuk pada aplikasi SIPD masih lambat	Berhasil	Mengidentifikasi seluruh kebutuhan belanja barang dan jasa	Rapat Koordinasi secara berkala dalam lingkup internal	Sekretariat
															Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan khtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Evaluasi dan pelaporan capaian kinerja daerah yang tersusun (dokumen)	9.529.920	TW 4: 10%	3.037.280	31,87	31,87	Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan seluruh pegawai Bappeda sehingga tercipta suasana kerja yang nyaman	Kurangnya pemahaman ASN terhadap tupoksi masing-masing	Berhasil	Menata secara terstruktur seluruh dokumen evaluasi perencanaan	Membentuk tim monitoring dan evaluasi kinerja	Sekretariat
													Adminstrasi Keuangan Perangkat daerah		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah laporan realisasi pembayaran gaji dan tunjangan beserta tambahan penghasilan bulanan bagi ASN (laporan)	3.510.316.966	TW 4 : 25%	755.748.754	21,53	21,53	Rencana pembayaran/ target pembayaran gaji sudah disusun secara baik dan akurat	-	Berhasil	Pembayaran gaji ASN Bappeda terbayar tepat waktu	Tetap mempertahankan sistem yang telah ada	Sekretariat
														3.567.301.716	Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD	Jumlah Dokumen Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang tersusun dan dilaporkan sesuai kewajiban Perangkat Daerah (dokumen)	56.984.750	TW 4: 10%	14.640.000	25,69	25,69	Optimalisasi peran SDM dalam penyusunan laporan keuangan (Pimpinan, PPTK,Bendahara, Opeartor)	laporan pertanggungjawaban masing-masing PPTK terkadang lambat	Berhasil	Merealisasikan gaji dan memberikan reward bagi ASN yang berprestasi	Tetap mempertahankan sistem yang telah ada	Sekretariat
													Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	126.484.750	Pengadaan Pakain Dinas Beserta atribut kelengkapannya	Jumlah paket pengadaan pakaian dinas bagi pegawai perangkat daerah sesuai rencana kebutuhan (paket)	15.000.000	TW 4 :	-	-	-	Adanya cukup anggaran yang diberikan	-	Berhasil	Perencanaan dan pengadaan yang baik dan mempertimbangkan efisiensi anggaran	Tetap mempertahankan sistem yang telah ada	Sekretariat
															Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat PIM (orang)	22.125.000	TW 4 :	-	-	-	Adanya cukup anggaran yang diberikan	adanya perubahan jadwal oleh pihak panitia	Berhasil	Perencanaan dan penganggaran yang matang adalah jalan terbaik	Jadwal harus disusun dengan baik	Sekretariat
															Bimbingan Tehnis implementasi Peraturan Perundang Undangan	Jumlah laporan kegiatan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan yang terlaksana (laporan)	89.359.750	TW 4 50%	27.697.750	31,00	31,00	adanya dukungan penuh dari pimpinan untuk meningkatkan kapasitas SDM Bappeda	-	Berhasil	Pemberian Bimbingan Teknis dalam lingkup SKPD salah satu opsi mengefisiensi anggaran	Tetap mempertahankan sistem yang telah ada	Sekretariat
													Administrasi Umum Perangkat Daerah	788.936.310	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan penunjang administrasi perkantoran sesuai rencana kebutuhan perbulan (paket)	78.288.040	TW 4 : 25%	45.089.290	57,59	57,59	Dukungan ketersediaan anggaran dalam pengadaan barang/jasa dan pemeliharaan	adanya item belanja yang tidak terdapat dalam e-catalog	Berhasil	Menerapkan budaya penghematan atau penyediaan bahan logistik sesuai kebutuhan	Penyesuaian jenis belanja yang tidak terdapat dalam e-catalog	Sekretariat
															Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket penyediaan bahan logistik makanan dan minuman bagi pegawai sesuai rencana kebutuhan perbulan (paket)	52.990.610	TW 3 : 25%	22.531.666	42,52	42,52	Dukungan ketersediaan anggaran dalam pengadaan barang/jasa dan pemeliharaan	Item belanja tidak terdapat dalam e-catalog	Berhasil	Mengefektifkan dan mengefisienkan penyediaan ATK (digunakan seperlunya)	Penyesuaian jenis belanja yang prioritas	Sekretariat
															Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan penunjang administrasi perkantoran sesuai rencana kebutuhan per bulan (paket)	43.095.660	TW 4 : 25%	24.913.660	57,81	57,81	Adanya cukup anggaran yang diberikan dan kegiatan dimaksud di dalamnya sifatnya wajib	Item belanja tidak terdapat dalam e-catalog	Berhasil	Mengupayakan pencetakan dan penggandaan secara mandiri	Tetap mempertahankan sistem yang telah ada	Sekretariat
															Penyedian Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Pembayaran Paket Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan sesuai rencana kebutuhan per bulan (eksamplar)	29.270.000	TW 4 : 25 %	8.640.000	29,52	29,52	Adanya cukup anggaran yang diberikan dan kegiatan dimaksud di dalamnya sifatnya wajib	Regulasi yang cepat berubah	Berhasil	Sebaiknya bahan bacaan yang di anggarakan sesuai dengan bacaan/berita yang teraktual terkait Perda terkait ketentrman dan keterliban umum	Tetap mempertahankan sistem yang telah ada	Sekretariat

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN KINERJA SASARAN		PROGRAM	INDIKATOR	ANGGARAN (Rp.)	Realisasi Anggaran Program			KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	TARGET	Realisasi Anggaran Kegiatan			FAKTOR		KESIMPULAN KEBERHASILAN/ KEGAGALAN	URAIAN REKOMENDASI	ALTERNATIF SOLUSI / TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
		STRATEGIS	SASARAN		PROGRAM	Anggaran (Rp)		Rp.		Keu (%)	Fisik (%)	Rp.							Keu (%)	Fisik (%)	PENDUKUNG	PENGHAMBAT																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		REALISASI KINERJA	%		PROGRAM	Anggaran (Rp)		Rp.		Keu (%)	Fisik (%)	PENDUKUNG							PENGHAMBAT																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
																		TW 4 : 25%	182.858.272	32,12	32,12	Adanya cukup anggaran yang diberikan dan kegiatan dimaksud di dalamnya sifatnya wajib	Perjalanan dinas mempunyai kompleksitas yang berbeda tiap instansi	Berhasil	Perjalanan dinas hendaknya memperhatikan prinsip-prinsip yaitu selektif, ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja, efisien dan akuntabilitas	Tetap berpedoman pada regulasi yang ada	Sekretariat																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN KINERJA SASARAN		PROGRAM	INDIKATOR	ANGGARAN (Rp.)	Realisasi Anggaran Program			KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	TARGET	Realisasi Anggaran Kegiatan			FAKTOR		KESIMPULAN KEBERHASILAN/ KEGAGALAN	URAIAN REKOMENDASI	ALTERNATIF SOLUSI / TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB		
		STRATEGIS	SASARAN		PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)		Rp.		Keu (%)	Fisik (%)	PENDUKUNG							PENGHAMBAT										
		REALISASI KINERJA	%		Rp.	Keu (%)		Fisik (%)		PENDUKUNG	PENGHAMBAT																		
															Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Rekomendasi Forum SKPD yang terlaksana (rekomendasi)	3.590.000	TW 3 : 100%	3.950.000	110,03	110,03	Komitemen seluruh aparat Perencana Kabupaten Bone untuk penyelesaian dokumen perencanaan	-	Berhasil	Meningkatkan lagi kegiatan ini secara rutin dan berkesinambungan dalam menampung segala usulan masyarakat maupun OPD	Updating seora berkala jadwal perencanaan yang dikondisikan dengan dinamika proses perencanaan yang berlangsung	Bidang PPD		
															Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Musrenbang RKPD yang dilaksanakan	39.004.940	TW 4 :-	39.004.940	100,00	100,00	Adanya anggaran serta SDM yang mumpuni untuk menjalankan kegiatan yang sifatnya wajib	Terbatasnya kemampuan APBD mempengaruhi realiasi usulan prgram kegiatan melalui musrenbang	Berhasil	Meningkatkan lagi kegiatan ini secara rutin dan berkesinambungan dalam menampung segala usulan masyarakat maupun OPD	Updating seora berkala jadwal perencanaan yang dikondisikan dengan dinamika proses perencanaan yang berlangsung	Bidang PPD		
															Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Laporan Bahan Musrenbang yang tersedia untuk Kecamatan	15.574.000	TW 3 :-	15.574.000	100,00	100,00	Adanya anggaran serta SDM yang mumpuni untuk menjalankan kegiatan yang sifatnya wajib	Terbatasnya kemampuan APBD mempengaruhi realiasi usulan prgram kegiatan melalui musrenbang	Berhasil	Meningkatkan lagi kegiatan ini secara rutin dan berkesinambungan dalam menampung segala usulan masyarakat	Updating seora berkala jadwal perencanaan yang dikondisikan dengan dinamika proses perencanaan yang berlangsung	Bidang PPD		
															Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	1. Jumlah Dokumen RKPD yang ditetapkan 2. Jumlah dokumen RPJMD yang tersusun	564.931.090	TW 4 : 70%	366.077.603	64,80	64,80	Komitemen seluruh aparat Perencana Kabupaten Bone untuk penyelesaian dokumen perencanaan	Proses perencanaan melalui aplikasi SIPD yang seringkali terkendala oleh proses pemutakhiran secara sepihak oleh Kemendagri	Berhasil	Menata secara terstruktur seluruh dokumen perencanaan	Updating seora berkala jadwal perencanaan yang dikondisikan dengan dinamika proses perencanaan yang berlangsung	Bidang PPD		
														Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	107.592.000	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan OPD	Jumlah Aplikasi e-planning yang dimanfaatkan	107.592.000	TW 4 : 30%	65.298.000	60,69	60,69	Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi	Keterlambatan dan keakuratan data dari OPD	Berhasil	memanfaatkan aplikasi e-Planning dalam proses perencanaan	Memfasilitasi perbaikan database perencanaan pembangunan daerah	Bidang PPD	
		Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase terget tahunan prioritas pembangunan daerah yang tercapai	Persen	100%	TW 1 : 45,84 TW 2 : 71,72 TW 3 : 90,88 TW 4 : 100																							
															Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	142.604.860	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi pembangunan daerah yang tersusun	142.604.860	TW 4 :25%	46.253.293	32,43	32,43	Tersedianya Peraturan Perundang-Undangan yaitu Undang-Undang No.25 Tahun 2004, Permendagri No.86 Tahun 2017 dan PP No.8 Tahun 2008	Kualitas SDM Perangkat daerah masih lemah	Berhasil	Menata secara terstruktur seluruh dokumen dan laporan Monev secara berkala dan terstruktur	Peningkatan kapasitas SDM	Bidang PPD
3	Meningkatkan Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah	Meningkatnya Ketersediaan Dokumen Perencanaan Sektorl dalam Menunjang Perumusan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase pemanfaatan dokumen perencanaan sektoral dalam pengambilan kebijakan perencanaan pembangunan	Persen	100%	TW 1 : 45,84 TW 2 : 71,72 TW 3 : 90,88 TW 4 : 100																							
							Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	1.363.910.500	1.339.512.408	98,21	98,21																	
															Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	263.379.050		Jumlah dokumen perencanaan bidang pemerintahan yang tersusun	164.400.000	TW 4 : 70%	16.470.000	10,02	10,02	Fasilitasi dan koordinasi yang baik dengan bidang terkait	Masih ada beberapa data yang belum akurat	Berhasil	Menata secara terstruktur seluruh dokumen perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Updating Data	Bidang PPM
															Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)			Jumlah dokumen hasil koordinasi perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia yang tersusun	156.000.000	TW 4 :70%	35.115.092	22,51	22,51	Fasilitasi dan koordinasi yang baik dengan bidang terkait	Masih ada beberapa data yang belum akurat	Berhasil	Menata secara terstruktur seluruh dokumen perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan manusia	Updating Data	Bidang PPM

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN KINERJA SASARAN		PROGRAM	INDIKATOR	ANGGARAN (Rp.)	Realisasi Anggaran Program			KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	TARGET	Realisasi Anggaran Kegiatan			FAKTOR		KESIMPULAN KEBERHASILAN/ KEGAGALAN	URAIAN REKOMENDASI	ALTERNATIF SOLUSI / TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
		STRATEGIS	SASARAN		PROGRAM	Rp.		Keu (%)		Fisik (%)	PENDUKUNG	PENGHAMBAT															
														Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Pembangunan Manusia yang tersusun		Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Manusia yang tersusun	75.000.000	TW 4 :30%	24.929.999	33,24	33,24	Fasilitasi dan koordinasi yang baik dengan bidang terkait	Masih ada beberapa data yang belum akurat		Menata secara terstruktur seluruh dokumen evaluasi perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan manusia	Updating Data	Bidang PPM
							Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan bidang Perencanaan dan Sumber Daya Alam				Koordinasi Perencanaan Bidang Perencanaan dan Sumber Daya Alam (SDA)	318.979.360	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan (RPJPD,RPJMD,dan RKPD)	Jumlah dokumen hasil koordinasi perencanaan pembangunan daerah bidang perkeonomian yang tersusun	98.979.050	TW 4 :20%	43.734.640	44,19	44,19	Sistem dan Regulasi sudah ada	Ada beberapa perangkat daerah yang lambat dalam menyampaikan data	Berhasil	Menata secara terstruktur seluruh dokumen perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan	Koordinasi intensif baik langsung maupun tidak langsung	Bidang Perkeonomian dan SDA	
														Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perencanaan	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Bidang Perkeonomian dan SDA yang tersusun	220.000.310	TW 4 :30%	46.897.070	21,32	21,32	Sistem dan Regulasi sudah ada	Ada beberapa perangkat daerah yang lambat dalam menyampaikan data	Berhasil	Menata secara terstruktur seluruh dokumen dan laporan Money secara berkala dan terstruktur	Menjalin komunikasi secara rutin	Bidang Perkeonomian dan SDA	
														Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD,RPJMD,dan RKPD)	Jumlah dokumen hasil koordinasi perencanaan pembangunan daerah bidang SDA yang tersusun	94.370.450	TW 4 :25%	48.568.110	51,47	51,47	Sistem dan Regulasi sudah ada	Ada beberapa perangkat daerah yang lambat dalam menyampaikan data	Berhasil	Menata secara terstruktur seluruh dokumen dan laporan Money secara berkala dan terstruktur	Menjalin komunikasi secara rutin	Bidang Perkeonomian dan SDA	
							Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan				Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	555.161.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Jumlah dokumen hasil koordinasi perencanaan pembangunan daerah bidang Infrastruktur yang tersusun	137.500.000	TW 4 :25%	33.550.000	24,40	24,40	Fasilitasi dan koordinasi kegiatan yang berkaitan dengan instruktur	Belum sinkronnya data infrastruktur dan kewilayahan	Berhasil	Menata secara terstruktur seluruh dokumen perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Sinkronisasi, koordinasi dalam penyusunan dan up date data infrastruktur dan kewilayahan	Bidang Infrasil	
														Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Jumlah dokumen hasil koordinasi perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan yang tersusun	267.661.000	TW 4 :25%	5.810.000	2,17	2,17	Terbentuknys team work pokja PKP dan Forum PKP	Up date data masih terkendala di OPD terkait Infrastruktur dan Kewilayahan	Berhasil	Menata secara terstruktur seluruh dokumen perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Sinkronisasi, koordinasi dan up dating data	Bidang Infrasil	
														Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah dokumen hasil sinergitas dan harmonisasi dokumen perencanaan perangkat daerah bidang kewilayahan yang tersusun	150.000.000	TW 4 :20%	113.931.950	75,95	75,95	Regulasi pembentukan Tim Penyusun Dokumen PSETK	Lambatnya OPD terkait dalam menindaklanjuti permintaan data	Berhasil	Menata secara terstruktur seluruh dokumen hasil sinergitas dan harmonisasi perencanaan Pembangunan Daerah	Sinkronisasi, koordinasi dan up dating data	Bidang Infrasil	

KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN BONE



[Handwritten signature]

Dr.H.ADE FARIQ ASHAR, S.STP,M.Si
Pangkat : Pembina Tk.I/IV.b
NIP : 19850126 200312 1 002